

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume 5 Nomor 1 November 2025

PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA)

Ainul Alfi Syahrin ^{1*)}; Irfan ²⁾; Januri ³⁾

1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: alfisyahrinhidayat@gmail.com

2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: dr.irfan@umsu.ac.id

3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: januri@umsu.ac.id

*Corresponding email: alfisyahrinhidayat@gmail.com

Abstract

This research aimed to investigate the effects of transparency, competence, and financial accounting systems on the accountability of regional financial management, with the Government Internal Control System (SPIP) serving as a moderating variable. The study population comprised all 78 employees of the Finance Department at the Langsa Mayor's Office, according to internal records as of January 2025. Using a saturated sampling technique, the entire population was included as the research sample, resulting in 78 respondents. Data were collected via questionnaires that had been validated and tested for reliability. The analysis was conducted using moderation analysis with SmartPLS 4.0 to assess both the direct impact of the independent variables on the dependent variable and the moderating effect of SPIP in enhancing or diminishing these relationships. The results show that transparency has a significant positive effect on the accountability of regional financial management, indicating that an increase in transparency can enhance the realization of accountable financial practices. The competency of regional government officials also demonstrates a significant positive effect, meaning that higher competency levels contribute to improved accountability in financial management. Furthermore, the financial accounting system shows a significant positive effect, suggesting that the effectiveness of accounting procedures and systems plays an important role in supporting accountability. Regarding the moderating effect of SPIP, transparency does not exhibit a significant influence, while both competency and the financial accounting system are strengthened by SPIP in their relationship with accountability. These findings highlight that SPIP serves as an important control mechanism that enhances the role of competence and financial accounting systems in achieving accountable regional financial management.

Keyword:

Transparency, Competency, Financial Accounting System, Accountability Of Regional Financial Management, Government's Internal Control System, SPIP.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Saragih & Alpi, 2023). Menurut Hasibuan dalam Hanum et al. (2024), manajemen merupakan seni dan ilmu mengatur serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai

tujuan. Dalam praktiknya, manajemen menuntut kemampuan mengambil keputusan, memotivasi, dan menciptakan sinergi antarindividu. Di era otonomi daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi sorotan publik (Mahmudi, 2019). Masyarakat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik, baik secara formal kepada lembaga pengawas maupun secara sosial kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu menyampaikan informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami agar publik dapat menilai efektivitas penggunaan sumber daya. Akuntabilitas yang baik juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi utama pemerintah daerah meliputi pelayanan publik, penetapan prinsip operasional, dan penyediaan layanan yang tidak dapat ditangani oleh pihak swasta (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, secara adil dan merata. Penetapan prinsip operasional mencakup penyusunan kebijakan, prosedur, serta standar pelayanan yang jelas agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan efisien dan akuntabel (Widanti, 2022). Selain itu, prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur dalam pengambilan keputusan, meminimalkan risiko kesalahan, serta menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan program dan layanan publik, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, penyediaan layanan yang tidak dapat ditangani swasta menegaskan peran pemerintah sebagai pelayan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat strategis, tidak menguntungkan secara komersial, atau rawan terjadi ketimpangan apabila diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah daerah berfungsi tidak hanya sebagai regulator dan pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan umum.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan seperti lemahnya pengendalian proyek dan penyelewengan dana yang menghambat pencapaian tujuan (Dahrani et al., 2022). Akuntabilitas mencakup transparansi, kompetensi, dan peningkatan kinerja (Lestari & Sari, 2021). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2023, dari 542 LKPD ditemukan 9.575 kelemahan sistem pengendalian internal senilai Rp5,15 triliun, serta 157 daerah belum mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi. Di Kota Langsa, realisasi pendapatan APBD 2020–2024 menurun dari 99,76% menjadi 97,58%, dengan selisih anggaran meningkat dari Rp2,016 miliar menjadi Rp22,847 miliar.

Kondisi ini menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang optimal, lemahnya pengawasan, dan potensi masalah transparansi. Karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah untuk memastikan pencapaian target yang lebih efektif. Penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem akuntansi terintegrasi, serta implementasi SPIP yang efektif menjadi langkah strategis untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Utami et al., 2020). Langkah ini sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional dan transparan. Dengan dukungan aparatur yang kompeten dan sistem pengendalian yang kuat, pengambilan keputusan keuangan dapat dilakukan secara tepat dan terukur. Pendekatan ini memperkuat prinsip good governance, meminimalkan risiko kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Vidyasari & Suryono, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Langsa memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara akuntabel. Pemerintah berperan sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan, memerlukan sarana dan fasilitas pendukung agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Akuntabilitas dalam pengelolaan belanja langsung menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Luqyana & Islahuddin, 2022).

Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah, karena penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai pengeluaran daerah secara efektif (Fauziyah & Handayani, 2017). Keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya pengawasan, dan sistem informasi yang belum optimal menjadi kendala dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Defana & Rahayu, 2023). Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur, penerapan sistem akuntansi keuangan yang terintegrasi, serta implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif menjadi kunci dalam memastikan transparansi, ketepatan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, koordinasi antarunit kerja, penggunaan teknologi informasi, dan evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan akan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Karim & Mursalin, 2019).

Transparansi menjadi elemen kunci dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nasir, 2021). Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara objektif, sehingga potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik dapat diminimalkan. Kasus Proyek Pembangunan Pagar Kawasan Wisata Hutan Kota Langsa yang mengalami kekurangan volume pekerjaan meski telah dibayar lunas menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan (kabartamiang, 2023), sekaligus menegaskan perlunya sistem pengendalian internal yang kuat. Kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan juga berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas (Sari et al., 2020). SDM yang kompeten mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara tertib, efisien, dan transparan (Zamzami & Gowon, 2021), serta mampu menghadapi dinamika tantangan fiskal secara profesional. Sistem akuntansi yang efektif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dilakukan secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini memungkinkan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik (Ningsih, 2021). Selain itu, sistem akuntansi yang andal juga menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta evaluasi kinerja keuangan. Ketika sistem ini didukung oleh transparansi yang tinggi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara optimal, memastikan setiap proses pengelolaan dana publik berjalan efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, sinergi antara transparansi, kompetensi SDM, dan sistem akuntansi yang handal tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, tetapi juga memperkuat prinsip good governance dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh (Surjono & Firdaus, 2017).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas (Ridzal et al., 2022). SPIP tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur, meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, SPIP membantu memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. SPIP membantu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung implementasi prinsip good governance. Selain itu, SPIP juga berperan dalam mendeteksi dan

mencegah potensi kecurangan, memperkuat akurasi informasi keuangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Arista et al., 2023). Dengan adanya SPIP, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terukur, dan kualitas laporan keuangan semakin andal. Hal ini pada akhirnya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik (Gustina, 2021). Penerapan SPIP turut meningkatkan koordinasi antarunit kerja, memperjelas alur tanggung jawab, serta meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan anggaran. Dengan adanya mekanisme pengendalian yang sistematis, keputusan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan berbasis bukti, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat diperkuat secara berkelanjutan. SPIP juga mendorong terciptanya budaya pembelajaran organisasi, di mana pegawai secara terus-menerus mengevaluasi praktik kerja, berbagi pengalaman, dan menerapkan perbaikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan (Erliyanti et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai bagian keuangan di Kantor Walikota Langsa, sebanyak 78 orang, berdasarkan data internal instansi per Januari 2025. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan dapat dijangkau sepenuhnya, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampel jenuh, sehingga seluruh pegawai bagian keuangan dijadikan responden. Kriteria pemilihan sampel dibatasi pada pegawai yang aktif bertugas di bagian keuangan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis moderasi dengan bantuan SmartPLS 4.0, yang memungkinkan pengujian pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus menilai peran SPIP sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas, tetapi juga menilai sejauh mana penerapan SPIP dapat memperkuat atau mengurangi pengaruh variabel-variabel tersebut, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini mengacu pada validitas konvergen dan diskriminan sebagai standar yang digunakan dalam PLS-SEM. Menurut Hair et al. (2019), validitas konvergen dapat diukur melalui *Average Variance Extracted* (AVE), di mana nilai $AVE \geq 0,50$ menunjukkan bahwa indikator secara memadai mampu menjelaskan varians konstruk yang diukur. Selain itu, Hair et al. (2017) menekankan bahwa kombinasi nilai loading indikator $> 0,70$, $AVE \geq 0,50$, dan *Composite Reliability* (CR) $\geq 0,70$ merupakan tolok ukur penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dengan demikian, instrumen yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap andal dan konsisten, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis serta analisis hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji *Loading Factor*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Kriteria
Transparansi (X1)	TP1	0,880	Valid
	TP2	0,733	Valid
	TP3	0,796	Valid
	TP4	0,883	Valid
	TP5	0,787	Valid
	TP6	0,775	Valid
	TP7	0,798	Valid
	TP8	0,817	Valid
	TP9	0,747	Valid
	TP10	0,816	Valid
Kompetensi (X2)	KP1	0,871	Valid
	KP2	0,789	Valid
	KP3	0,784	Valid
	KP4	0,875	Valid
	KP5	0,763	Valid
	KP6	0,870	Valid
	KP7	0,793	Valid
	KP8	0,746	Valid
	KP9	0,853	Valid
	KP10	0,787	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan (X3)	SAK1	0,708	Valid
	SAK2	0,856	Valid
	SAK3	0,755	Valid
	SAK4	0,791	Valid
	SAK5	0,798	Valid
	SAK6	0,794	Valid
	SAK7	0,798	Valid
	SAK8	0,817	Valid
	SAK9	0,797	Valid
	SAK10	0,816	Valid
SPIP (Z)	SPIP1	0,825	Valid
	SPIP2	0,782	Valid
	SPIP3	0,810	Valid
	SPIP4	0,765	Valid
	SPIP5	0,867	Valid
	SPIP6	0,780	Valid
	SPIP7	0,882	Valid
	SPIP8	0,793	Valid
	SPIP9	0,856	Valid
	SPIP10	0,755	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z)	APK1	0,825	Valid
	APK2	0,782	Valid
	APK3	0,810	Valid
	APK4	0,765	Valid
	APK5	0,867	Valid

APK6	0,780	Valid
APK8	0,882	Valid
APK8	0,793	Valid
APK9	0,882	Valid
APK10	0,793	Valid

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil pengujian outer loading pada SmartPLS, seluruh indikator dari variabel Transparansi (X1), Kompetensi (X2), Sistem Akuntansi Keuangan (X3), SPIP (Z), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) memiliki nilai loading > 0,700, sehingga semua indikator memenuhi convergent validity. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan secara memadai merefleksikan konstruk yang diukur, dan instrumen penelitian dinyatakan valid untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Selain itu, nilai outer loading yang tinggi ini mengindikasikan konsistensi internal instrumen, sehingga setiap indikator memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk konstruk masing-masing variabel. Dengan validitas yang terjamin, hasil analisis selanjutnya, termasuk pengujian pengaruh antarvariabel dan peran moderasi SPIP, dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, memastikan kesimpulan penelitian memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
SPIP (Z)	0,591	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,662	Valid
Transparansi (X1)	0,647	Valid
Kompetensi (X2)	0,609	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0,631	Valid

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE), semua variabel laten, SPIP (Z), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), Transparansi (X1), Kompetensi (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan (X3) memiliki nilai AVE > 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, sehingga semua variabel memenuhi convergent validity dan instrumen dianggap valid. Selain itu, pencapaian nilai AVE yang memadai ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan konstruk yang diukur, sehingga analisis hubungan antarvariabel dan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dengan validitas yang terjamin, hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan serta rekomendasi kebijakan yang lebih akurat.

Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam suatu konstruk, dengan nilai $\geq 0,7$ dianggap reliabel, sementara nilai terlalu tinggi ($> 0,9$) bisa menandakan redundansi item. *Composite Reliability* (CR) lebih unggul untuk model PLS karena memperhitungkan kontribusi setiap indikator melalui *factor loading*; nilai CR $\geq 0,7$ dianggap baik dan $\geq 0,8$ sangat baik (Hair et al., 2010). Selain itu, kombinasi nilai *Cronbach's Alpha* dan CR yang memadai menunjukkan bahwa instrumen penelitian tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga mampu memberikan pengukuran yang stabil dan akurat terhadap konstruk yang diteliti, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan dijadikan dasar pengambilan keputusan yang valid.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Transparansi (X1)	0.874	0.816
Kompetensi (X2)	0.832	0.853
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0.789	0.791
SPIP (Z)	0.892	0.882
Akunabilitas (Y)	0.725	0.734

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR) masing-masing di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Variabel SPIP menempati nilai tertinggi dengan α sebesar 0,892 dan CR sebesar 0,882, menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik dan konsistensi indikator yang tinggi dalam merefleksikan konstruk SPIP. Sementara itu, variabel Akuntabilitas memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,725 dan CR 0,734, meskipun merupakan nilai terendah di antara variabel yang diuji, tetap berada dalam kategori reliabilitas yang memadai dan dapat diterima. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis dan analisis data lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi atau *R-Square* (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain, R^2 mengukur tingkat kecocokan model terhadap data. Selain itu, nilai R^2 juga memberikan indikasi kekuatan prediktif model; semakin tinggi R^2 , semakin baik model dalam memprediksi atau menjelaskan variabel dependen, meskipun perlu diingat bahwa R^2 yang terlalu tinggi bisa menandakan adanya overfitting, sehingga perlu dikombinasikan dengan evaluasi statistik lainnya untuk memastikan validitas model.

Tabel 4. Uji *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
SPIP (Z)	0,820	0,815	Kuat
Akunabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,921	0,918	Kuat

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel *R-Square* di atas menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 untuk SPIP (Z) sebesar 0,820 (adjusted 0,815) menunjukkan bahwa 82% variasi SPIP dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, tergolong kuat. Sedangkan R^2 untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,921 (adjusted 0,918) menunjukkan 92,1% variasi akuntabilitas dijelaskan oleh variabel independen, juga termasuk kategori kuat. Ini menandakan model memiliki kemampuan prediksi yang baik.

Pengujian Variabel Penelitian

Uji signifikansi dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian dan mengetahui pengaruh parsial secara langsung antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dan mengetahui pengaruh parsial secara tidak langsung antara variabel laten melalui variabel

moderasi (Hamidi & Anwar, 2019). Uji signifikansi pada analisis PLS dilakukan dengan metode kalkulasi bootstrapping terhadap diagram jalur yang telah dikonstruksi guna meminimalisir adanya permasalahan terhadap kenormalan data penelitian. Hasil *bootstrapping* diagram jalur penelitian dipaparkan dalam tabel.

Tabel 5. Uji Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Transparansi (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,589	0,589	0,095	6,198	0,000
Kompetensi (X2) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,472	0,478	0,148	3,189	0,002
Sistem Akuntansi Keuangan (X3) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,202	0,212	0,094	2,154	0,032

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Hasil uji pengaruh langsung menunjukkan bahwa Transparansi (X1), Kompetensi (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dari nilai T-statistik masing-masing di atas 1,96 dan P-Value < 0,05. Transparansi memiliki pengaruh paling besar (0,589), diikuti Kompetensi (0,472) dan Sistem Akuntansi Keuangan (0,202), menandakan bahwa peningkatan ketiga variabel ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan penerapan sistem akuntansi yang efektif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi serta kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tabel 6. Uji Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Moderasi	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
SPIP (Z) x Transparansi (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,094	0,091	0,051	1,827	0,038
SPIP (Z) x Kompetensi (X2) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,096	0,091	0,045	2,138	0,033
SPIP (Z) x Sistem Akuntansi Keuangan (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,097	0,091	0,045	2,487	0,041

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa SPIP mampu memperkuat pengaruh Kompetensi (X2) dan Sistem Akuntansi Keuangan (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) secara signifikan, dengan P-Values < 0,05 dan t-statistik > t-tabel.

Sementara itu, pengaruh Transparansi (X1) yang dimoderasi SPIP tidak signifikan ($P\text{-Value} > 0,05$ dan $t < t\text{-tabel}$), sehingga penguatan hubungan oleh SPIP pada variabel ini tidak terbukti secara statistik. Besarnya efek moderasi yang signifikan berkisar antara 9,6%–9,7%. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan SPIP lebih efektif dalam memaksimalkan pengaruh kompetensi aparatur dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas, sehingga kemampuan SDM yang terampil dan sistem akuntansi yang andal dapat dijalankan secara lebih optimal dengan dukungan mekanisme pengendalian internal yang kuat.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian regresi struktural menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan koefisien jalur 0,589 dan $P\text{-Value} 0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi pula akuntabilitas yang dapat diwujudkan, dengan kontribusi sebesar 58,9%. Temuan ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengawasan publik dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Transparansi yang efektif tidak hanya mencakup publikasi laporan keuangan, tetapi juga penyediaan informasi yang relevan, mudah diakses, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau pelaksanaan anggaran secara objektif dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori agensi, yang menekankan bahwa transparansi berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga risiko moral hazard dapat diminimalkan. Dengan transparansi yang memadai, masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran, kinerja proyek, dan pengambilan keputusan pemerintah, sehingga akuntabilitas dapat ditegakkan secara lebih efektif. Selain itu, penerapan transparansi yang konsisten juga dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Namun, praktik transparansi saat ini masih bersifat administratif dan formal, seperti publikasi laporan keuangan, dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan pada tahap implementasi proyek. Transparansi substantif diperlukan, yakni informasi yang relevan, mudah diakses, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah benar-benar terwujud. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa transparansi merupakan faktor determinan dalam meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai p sebesar $0,002 < 0,05$ dan koefisien jalur sebesar 0,472. Artinya, pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas adalah sebesar 47,2%, yang menegaskan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan teknis serta manajerial agar aparatur mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Selain itu, kompetensi yang memadai juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, pengelolaan risiko yang lebih efektif, dan peningkatan kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat tercapai secara optimal. Temuan ini sejalan dengan *dynamic capability theory*, yang

menekankan pentingnya kemampuan organisasi dalam mengembangkan dan mengonfigurasi ulang kapasitas internal secara berkelanjutan agar mampu merespons tantangan eksternal. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan adaptif, analitis, dan strategis untuk menghadapi dinamika lingkungan pemerintahan.

Dengan kemampuan tersebut, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan keputusan-keputusan keuangan diambil secara tepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kompetensi aparatur tidak hanya mencakup keterampilan teknis seperti penyusunan anggaran, pelaporan keuangan sesuai SAP, serta manajemen risiko, tetapi juga mencakup kemampuan analitis, adaptif, dan etis untuk memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.

Secara praktis, kompetensi aparatur berfungsi sebagai modal utama dalam mencegah kesalahan teknis, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan output pembangunan yang dihasilkan. Lemahnya kompetensi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi proyek, sebagaimana tercermin dalam temuan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan pada proyek pembangunan di Langsa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai p sebesar $0,032 < 0,05$ dan koefisien jalur sebesar 0,202. Hal ini berarti SAK memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, meskipun persentasenya relatif lebih kecil dibandingkan variabel transparansi dan kompetensi. Meski demikian, peran SAK sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara akurat dan sistematis, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau manipulasi data. Selain itu, SAK mendukung integrasi data antarunit kerja, mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Dengan demikian, keberadaan SAK tidak hanya penting untuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang memperkuat transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, SAK berfungsi sebagai tulang punggung pengelolaan keuangan daerah, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara sistematis, penerapan kontrol internal, serta integrasi data lintas unit kerja. Sistem akuntansi yang baik tidak hanya mempercepat penyusunan laporan, tetapi juga memperkuat pengawasan, mengurangi peluang manipulasi data, serta menyediakan akses informasi yang transparan bagi publik. Oleh karena itu, meskipun kontribusinya secara statistik lebih kecil, keberadaan SAK yang kuat tetap menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip *good governance*.

Permasalahan yang masih ditemukan oleh BPK terkait lemahnya implementasi SAK menunjukkan bahwa sistem ini perlu terus diperkuat melalui modernisasi berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Modernisasi sistem akuntansi yang terintegrasi, real-time, dan sesuai regulasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keterandalan data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan

demikian, meskipun variabel lain seperti transparansi dan kompetensi memiliki pengaruh yang lebih besar, SAK tetap menjadi instrumen fundamental yang menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan reliabilitas laporan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung transparansi terhadap akuntabilitas melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki koefisien 0,094 dengan t-statistic 1,827 dan signifikansi 0,068. Meskipun hasil ini belum signifikan pada level 5%, temuan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa SPIP dapat berperan sebagai variabel moderasi yang potensial untuk memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas.

Secara praktis, hal ini berarti bahwa ketika transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah didukung oleh penerapan SPIP yang efektif, informasi yang tersedia bagi publik dan lembaga pengawas menjadi lebih akurat, dapat diverifikasi, serta lebih terlindungi dari risiko penyalahgunaan atau manipulasi. SPIP berperan sebagai kerangka pengendalian yang memastikan bahwa setiap data dan laporan keuangan yang dipublikasikan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, meskipun pengaruh moderasi SPIP terhadap transparansi belum sepenuhnya signifikan, penerapan SPIP tetap memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengawasan, mendukung transparansi yang substantif, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa transparansi tidak selalu efektif tanpa adanya pengendalian internal yang memadai. SPIP berperan sebagai enabler dan buffer, yang memastikan informasi terbuka benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pengawasan.

Kelemahan implementasi SPIP, seperti keterbatasan pemahaman aparatur, lemahnya komitmen pimpinan, dan kurangnya monitoring berkelanjutan, membuat peran moderasi SPIP belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPK yang masih mencatat banyak kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan regulasi di daerah. Secara konseptual, SPIP seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas melalui lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Akan tetapi, bukti penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih parsial dan administratif. Terutama pada aspek penilaian risiko, kelemahan ini membuat keterbukaan informasi publik tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang nyata. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pengendalian, dan pengawasan ketat menjadi langkah strategis agar SPIP benar-benar mampu memperkuat transparansi dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ketika diperkuat oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan nilai koefisien jalur 0,096, t-statistic 2,138, dan signifikansi 0,033 ($<0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa SPIP berperan efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas. Artinya, kemampuan teknis, keterampilan, pengetahuan regulasi, serta integritas aparatur akan lebih optimal dalam meningkatkan akuntabilitas apabila diterapkan bersamaan dengan SPIP yang terstruktur, terukur, dan konsisten.

SPIP memastikan bahwa prosedur pengendalian internal dijalankan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga kompetensi aparatur tidak hanya menjadi potensi tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dengan demikian, kombinasi kompetensi yang memadai dan penerapan SPIP yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan, penyalahgunaan anggaran, dan pelanggaran prosedur, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi aparatur memengaruhi kualitas pelaksanaan prosedur pengendalian internal, karena pemahaman terhadap akuntansi, regulasi, dan manajemen risiko memungkinkan unsur-unsur SPIP seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, peluang terjadinya kesalahan, penyalahgunaan anggaran, maupun pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi. SPIP berperan memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur benar-benar diterapkan dalam praktik yang terarah, terukur, dan sesuai prinsip *good governance*, sehingga akuntabilitas dapat terwujud baik secara formal maupun substantif.

Lebih jauh, SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis yang menyalurkan kompetensi ke arah yang produktif melalui lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Aparatur yang kompeten mampu mengintegrasikan SPIP ke dalam seluruh siklus manajemen keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa SPIP, kompetensi yang tinggi belum tentu menghasilkan akuntabilitas karena tidak ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai. Dengan adanya SPIP yang efektif, kompetensi aparatur menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat pengendalian risiko, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, serta membangun kepercayaan publik.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika diterapkan bersamaan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi. Nilai koefisien jalur sebesar 0,097, t-statistic 2,487, dan signifikansi 0,041 ($<0,05$) menegaskan bahwa SPIP berperan efektif dalam memperkuat hubungan antara SAK dan akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa keberhasilan SAK dalam meningkatkan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada adanya pengendalian internal yang kuat melalui SPIP.

Dengan kombinasi ini, SAK dapat berfungsi lebih dari sekadar pencatatan administratif; sistem akuntansi dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat, real-time, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan pengawasan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan anggaran. Secara keseluruhan, sinergi antara SAK dan SPIP mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai prinsip *good governance*, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa SAK tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan, kebijakan fiskal, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam hal ini, SPIP berfungsi sebagai kerangka pengendalian yang memastikan sistem akuntansi berjalan sesuai prosedur, mencegah kecurangan, dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kombinasi SAK yang andal dan SPIP yang kuat dapat mengurangi kesalahan pencatatan, memperbaiki efektivitas pengendalian, serta memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip *good governance*. Lebih lanjut, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan memerlukan

integrasi antara penerapan SAK berbasis standar akuntansi pemerintahan dan SPIP yang dilaksanakan secara komprehensif melalui lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

SPIP memastikan bahwa kompetensi aparatur dan sistem akuntansi benar-benar dioptimalkan dalam praktik, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sinergi kedua aspek tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan masing-masing berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan sistem akuntansi yang andal dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam peran moderasi, SPIP tidak memperkuat hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas, namun terbukti memperkuat pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa efektivitas SPIP sangat penting dalam memastikan sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sekaligus menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar setiap proses pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal, meminimalkan risiko penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

REFERENSI

- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Economina*, 2(7), 1719-1729.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 21–30.
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24.
- Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 39–49.
- Lestari, I., & Sari, M. (2021). The Effect Of Transparency And Accountability On The Performance Of Employees Of PT Bank Sumut KC Syariah Tebing Tinggi. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 140–156.

- Luqyana, L., & Islahuddin, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 83–94.
- Mahmudi, M. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. (2021). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAQBAJ>
- Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*.
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 183–198.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094–3104.
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10.
- Sari, E. N., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang: Sistem Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Silvia, R., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Time Pressure Dan Pemahaman Sistem Informasi terhadap Kualitas Audit dengan Due Professional Care sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4475–4489.
- Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) pemerintah daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357–1368.
- Utami, N. P. S., Merta, I. W. G., & Manuaba, I. B. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 42–47.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening:(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(3), 136–148.